

**Dampak Itsbat Nikah Terhadap Penerapan Uu No. 22
Tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan
(Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan)**

TESIS

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah**



Oleh:

Jauhar Rochman

503210025

**PROGRAM MAGISTER
PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya, **Jauhar Rochman 503210025**, Program Magister **Prodi Ahwal Syakhsiyah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **"Dampak Itsbat Nikah Terhadap Penerapan Uu No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan) "** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 20 April 2023
Pembuat Pernyataan,



Jauhar Rochman
NIM 503210025

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Jauhar Rochman**
NIM : **503210025**
Program Studi : **Ahwal Syakhsiyyah**
Judul Tesis : **Dampak Itsbat Nikah Terhadap Penerapan
UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan
Pernikahan (Studi di Pengadilan Agama
Kabupaten Pacitan)**

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2023

Penulis,



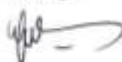
Jauhar Rochman

503210025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Janhar Rochman 503210025**, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: **"Dampak Isbat Nikah Terhadap Eksistensi Penerapan UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan (studi di Pengadilan Agama Pacitan)"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Mumpawah tesis.

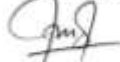
Pembimbing I,



Dr. ROHMAH MAULIDLA, M.Ag.
NIP. 197711112005012003

Ponorogo, 11 Mei 2023

Pembimbing II,



Dr. LUHUR PRASETYO, S.Ag., M.E.L.
NIP. 197801122006041002





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA

Alamat: Jl. Prambada No. 106, Po. Box 116 Ponorogo 62071 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 441041

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Junhar Rochman**, NIM 503210025, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsyiah dengan Judul "*Dampak Isbat Nikah Terhadap Penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi di Pengadilan Agama Pacitan)*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munasabah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari **Kamis, tanggal 25 Mei 2023** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

NO	Nama Penguji	Tanda tangan	Tanggal
1.	Nur Kholis, Ph.D. NIP. 197106231998031002 Ketua Sidang		9/6 2023
2.	Dr. H. Saifullah, M.Ag NIP. 196208121993031001 Penguji Utama		9/6 2023
3.	Dr. Hj. Rohmah Maulidha, M.Ag NIP. 1977111120060120002 Penguji 2/Pembimbing 1		9/6 2023
4.	Dr. Luthar Prasetyo, M.E.I. NIP. 197801122006041002 Sekretaris Pembimbing 2		9/6 2023

Ponorogo, 9 Juni 2023

Direktur Pascasarjana,

Dr. M. Tasrif, M. Ag

NIP. 197401081999031001



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penelitian tesis yang berjudul: **“Dampak Itsbat Nikah Terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan)”** ini. Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum M.H. pada Program Magister Prodi Ahwal Syakhshiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Bapak Wiwik Rochmadi dan Ibu Siti Chotijah, Mertua Ibu Suyati, terspesial buat dukungan keluarga tercintaku, istriku Suharni dan kedua malaikat penyemangatku Nabila Fadhila Rahman dan Ahya El Karima yang selalu mensupport selama ini.

Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Muhammad Riski, S.H. dan Bapak Irman Fadly, S.Ag., M.H., selaku pimpinan Pengadilan Agama Pacitan yang memberikan semangat dan semangat kepada kami menyelesaikan studi ini.

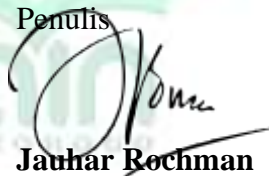
Terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing tesis, yaitu Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. dan Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag., M.E.I., yang telah mengarahkan dan mengingatkan kelalaian Penulis selama menyusun tesis dari awal hingga selesai.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor IAIN Ponorogo, Dr. Hj. Evi Muawiyah, M.Ag., Direktur Pascasarjana Dr. Muh. Tasrif, M.Ag., Ketua Program Studi Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas dan layanan dalam proses pembelajaran dan penyelesaian studi. Tak lupa pula, Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf administrasi IAIN Ponorogo dan perpustakaan, termasuk rekan-rekan sejawat

yang menaruh perhatian dan bantuan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini. Akhirnya, Penulis berharap semoga karya ilmiah ini bisa memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati, menjadi amal jariyah Penulis yang dinilai saleh di sisi Allah SWT., dan setiap kritik atas kekurangan tesis ini diharapkan muncul Penelitian serupa yang memperdalam dan mengembangkan wacana demi kajian lanjutan yang lebih bermakna bagi umat dan masyarakat bangsa, amin.

Ponorogo, 04 April 2023

Penulis



Jauhar Rochman

NIM 503210025

ABSTRAK

Nikah siri adalah pelanggaran hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum. Pemerintah menetapkan bagi pelaku nikah siri dapat mengajukan isbat nikah untuk mengesahkan pernikahan sebelumnya. Akibat dari peraturann isbat nikah maka berpengaruh pada penerapan uu No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tiga rumusan masalah 1) Faktor-faktor apa saja yg menyebabkan itsbat nikah di KaPacitan? 2) Bagaimana prosedur itsbat nikah di pengadilan Agama Kabupaten Pacitan? 3). Bagaimana Implikasi Itsbat nikah terhadap Penerapan UU No. 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitiaann kualitatif dengan teknik triangulasi sumberdata dan selanjutnya peneliti analisis dengan beberapa teori efektifitas hukum. Hasil dari pembahasan implikasi itsbat nikah terhadap kewajiban pencatatan pernikahan sesuai UU No. 22 tahun 1946 maka ketika melihat faktor terjadinya itsbat nikah disebabkan dari adanya pernikahan siri sementara tujuan penerapan UU No. 22 tahun 1946 untuk mengatasi adanya konflik yang disebabkan dari pernikahan siri hal ini tidak dapat berpengaruh pada penerapan UU tersebut. Sesuai dengan teori dalam penegakan hukum bahwa hukum tanpa adanya sangsi maka tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci : Dampak, Isbat Nikah, Pencatatan Perkawinan

ABSTRACT

Unregistered marriage is a violation of the law. If only the government could be more assertive, the perpetrators of unregistered marriages could be subject to legal sanctions. The government stipulates that unregistered marriage actors can apply for a marriage certificate to legalize their previous marriage. As a result of the marriage registration regulations, it affects the existence of the application of Law No. 22 of 1946 concerning registration of marriages. In this study, the researchers took three problem formulations: 1) What factors caused itsbat marriage in KaPacitan? 2) What is the procedure for itsbat nikah at the Pacitan District Religious Court? 3). What are the Implications of Itsbat Marriage on the Existence of the Application of Law no. 22 of 1946 concerning Marriage Registration?. This study uses a qualitative research method with triangulation of data sources and further analysis by researchers using several theories of legal effectiveness. The results of the discussion of the implications of itsbat nikah on the obligation to register marriages according to Law no. 22 of 1946, when looking at the factors in the occurrence of itsbat marriage caused by the existence of unregistered marriages while the purpose of implementing Law no. 22 of 1946 to overcome conflicts caused by unregistered marriages, this cannot affect the implementation of the law. In accordance with the theory in law enforcement that law without sanctions cannot run optimally.

Keywords: *Impact, Marriage Certificate, Marriage Registration*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DALAM	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI.....	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK.....	
PEDOMAN	
TRANSLITERASI.....	
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Definisi Oprasional	13
G. Landasan Teori	16
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II : TEORI EFEKTIFITAS HUKUM	
A. Pengertian Efektifitas Hukum	32

B. Teori Efektivitas Hukum.....	39
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	41
D. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum	49
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Profil Kabupaten Pacitan.....	58
B. Sejarah Kabupaten Pacitan.....	60
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Itsbat Nikah Di Kabupaten Pacitan.....	65
B. Prosedur Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan	92
C. Analisis Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan	101
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran	110
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Table 1.1 Informan Ahli	
2. Table 2.1 Informan Pembanding	

3. Table 1.2 Permohonan Itsbat Nikah dari tahun 2017-2022



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al-qur'an juga menyebut dalam suarah An-Nisa 4:21, bahwa perkawinan sebagai *mitsaaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.¹

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan

¹ Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bgai Perempuan, (Penelitian, 2008), h. 1

juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Penjelasan Pasal 1) juga dalam UU No. 1 tahun No. 22 tahun 1946 tentang perkawinan ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6. Dalam Hukum Islam, Hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain.²

Perkawinan adalah *mitsaqan ghalidan*, atau ikatan yang kokok yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan Al-qur'an dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa ha-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali.³

² J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h 46.

³ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 18.

Adapun syarat sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami Istri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali.⁴

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah diatas, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Biasa jadi ini didasarkan pada pernikahann masa Rasululllah sendiri tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan. Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resikonya masih dijadikan sebagai alternatif. Dikalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan rosedur yang praktis tanpa

⁴ Wahbah Zuhaili, All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu (Beirut, Dar-al-Fikr, 1989), h. 62

dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Nikah siri adalah pelanggaran hukum. Kalau saja pemerintah bisa lebih tegas lagi, maka para pelaku nikah siri bisa dikenakan sanksi hukum. Problem hukum dalam pernikahan siri terjadi pada pihak perempuan dan anak. Sebagai istri yang sah secara agama, istri tidak bisa menuntut hak nafkah lahir batin hak waris bila terjadi perceraian, hak pengaduan bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan hukum bila ditinggal pergi tanpa pesan. Posisi suami yang tidak tersentuh hukum, memunculkan ruang yang lebar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak dijumpai entah dalam bentuk kekerasan fisik, psikhis, ekonomi maupun kekerasan seksual. Pernikahan ini sangat menguntungkan pihak suami , karena a). Suami bebas untuk menikah lagi , karena pernikahannya dianggap tidak pernah ada secara hukum, b). Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya

memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, c). Suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan, hak nafkah istri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian.⁵

Dari permasalahan yang sering terjadi akibat adanya pernikahan siri maka pihak negara memberikan kelonggaran apabila ada pernikahan yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah maka diperbolehkan melakukan itsbat nikah dengan syarat-syarat Berdasarkan syarat-syarat itsbat nikah dapat di simpulkan bahwa tidak semua peristiwa perkawinan dapat diitsbatkan oleh Pengadilan Agama, artinya permohonan itsbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses pesidangan ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan itsbat nikahnya tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Kecuali ada pertimbangan lain

⁵ Edi Gunawan, "Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Al-Syir,ah* 3, no. 2 (2013): 6, <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/163/138>.

dari hakim maka akan Dikabulkan.⁶ Sementara terdapat dilihat kasus itsbat nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Pacitan terdapat 9 kasus Itsbat nikah.⁷ Yang 1 (satu) di tolak dikarenakan pernikahan dibawah umur, kasus itsbat nikah yang di bawah umur diakibatkan dari pernikahan siri yang dilakukan remaja dikarenakan hamil diluar nikah sehingga mereka melakukan pernikahan siri dan selang beberapa bulan di daftarkan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pacitan.⁸ Dari permasalahan diatas maka penulis ingin meneliti tentang dampak itsbat nikah terhadap penerapan UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan (studi di Pengadilan Agama Pacitan)

B. Rumusan Masalah

- A. Faktor-faktor apa saja yg menyebabkan itsbat nikah di KaPacitan?
- B. Bagaimana prosedur itsbat nikah di pengadilan Agama Kabupaten Pacitan?

⁶ Mahkamah Agung, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, (Buku II), Jakarta, 2010, hlm.147

⁷ Dokumen Pengadilan Agama Pacitan, tahun 2022

⁸ Wawancara, Supardi di Pengadilan Agama Pacitan, 20 Mei 2022

C. Bagaimana Implikasi Itsbat nikah terhadap Penerapan UU No. 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan?

C. Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini, Setelah terjawab atas kajian rumusan masalah tersebut, maka para pembaca diharapkan dapat:

1. Mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan itsbat nikah di Kabupaten Pacitan.
2. Mengetahui prosedur itsbat nikah Di pengadilan Agama Kabupaten Pacitan.
3. Mendeskripsikan implikasi itsbat nikah terhadap Penerapan UU No. 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan dan sebagai landasan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis dalam mengkaji hukum pernikahan, khususnya tentang implikasi itsbat nikah terhadap penerapan UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Harapan dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat umumnya dan para pembaca penelitian agar memahami tentang dampak-dampak dari pernikahan siri dan akibat hukumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai tinjauan pustaka dalam penelitian ini perlu untuk dicantumkan. Karena dengan adanya tinjauan pustaka peneliti mengupayakan sebuah analisis terhadap suatu data untuk menarik sebuah kesimpulan. Data yang ada tidak diadopsi seluruhnya, tetapi akan dilakukan penyesuaian dan tidak menutup kemungkinan adanya reduksi data, perubahan konsep yang telah ditetapkan sebelumnya dengan konsep lain yang lebih akurat dan tepat, atau membuang pandangan-pandangan teoretis atau temuan peneliti lain yang diyakini kurang relevan lagi dan diganti dengan pandangan teoritik lain yang lebih relevan.

Pertama, jurnal yang disusun oleh Cucu Solihah, dengan judul *Dampak Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur*. Dalam

jurnal ini dijelaskan kebijakan itsbat nikah berlaku terhadap perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun No. 22 tahun 1946 juga terhadap Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun No. 22 tahun 1946, namun kebijakan tersebut juga dimanfaatkan oleh pasangan suami istri yang menikah dengan cara siri dan perkawinan campuran. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis berupa analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa peraturan yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi pemanfaatan celah hukum dari kebijakan itsbat nikah oleh masyarakat dan warga Negara asing dalam menikahi wanita Indonesia guna menghindari syarat administrasi perkawinan.⁹

⁹ Cucu sholihah, *Kebijakan Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.4, Oktober2019, Halaman 376-384.

Kedua, Jurnal yang disusun oleh Faizah Bafadhal dengan judul *Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa Dengan adanya itsbat nikah dari Pengadilan Agama akan berpengaruh terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, begitu pula terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dan memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak isteri dalam perkawinan tersebut dan hak anak serta harta benda dalam perkawinan.¹⁰

Ketiga, jurnal yang disusun oleh Iskandar & Sudirman, dengan judul *Transformasi Pencatatan Perkawinan Terhadap Itsbat Nikah Di Indonesia Dalam Tinjauan Masalah*. Dalam jurnal tersebut dijelaskan Jika itsbat nikah tetap ingin dilanjutkan dengan sistem seperti yang berlaku saat ini maka secara otomatis menciderai dan tidak mengakui UU No.1 tahun No. 22 tahun 1946 ayat 2 dan pasal 7 kompilasi Hukum Islam. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah tidak terjadinya tertib

¹⁰ Asmawati, "Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Univ. Jambi.," *Ilmu hukum* 6, no. 4 (1999).

administrasi dalam pencatatan perkawinan, mudahnya menikah baik istri pertama maupun istri-istri selanjutnya, poligami non administrative, serta dampak dampak yang lainnya. Jika pemerintah serius menangani permasalahan itsbat maka pastinya harus melakukan hal-hal berikut: Pertama, membuat aturan atau minimal peraturan setingkat dengan peraturan Menteri atau mahkamah agung untuk memberikan sanksi bagi pelaku nikah tanpa pencatatan oleh pencatat yang legel dalam hal ini KUA agar pintu pernikahan yang tidak dicatatkan dapat berhenti. Kedua, bagi yang telah menikah tanpa adanya pencatatan diberikan tenggang waktu untuk meregistrasi pernikahannya seperti dalam bentuk itsbat atau kegiatan program yang sah diakui oleh negara terhitung sejak tahun 2019 sampai 3 tahun kedepan wajib mendaftarkan perkawinannya. Jika melewati tahun 2022 pernikahan tersebut tidak dapat lagi diitsbatkan. Ketiga, itsbat nikah yang dilakukan dalam tahun 2019 sampai 2022 adalah perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 2019. Adapun perkawinan yang dilakukan setelah tahun 2019 tidak dapat diitsbatkan. Jika poin-poin tersebut di atas dilakukan oleh pemerintah, maka pasti akan tercipta suatu tatanan administrasi yang bagi pernikahan.

Hal tersebut juga akan menutup pemahaman yang selalu memisahkan antara ayat 1 dan ayat 2 UU No. 1 tahun No. 22 tahun 1946 tentang perkawinan.¹¹

Keempat, jurnal yang disusun oleh Yusriyah dengan judul *Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Itsbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas)*. Dalam jurnal tersebut dijelaskan Pengajuan itsbat nikah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan suatu legalitas dan kepastian hukum guna mendapatkan hak keperdataan dari suatu perkawinan. Kebijakan itsbat nikah berlaku terhadap hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya akta nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun No. 22 tahun 1946 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun No. 22 tahun

¹¹ Iskandar & sudirman, *Transformasi Pencatatan Perkawinan Terhadap Itsbat Nikah Di Indonesia Dalam Tinjauan Masalah*, Transformasi: Jurnal Kepemimpinan Dan Pendidikan Islam Volume: 3 Nomor 1 Desember 2019

1946. Namun demikian tidak jarang kebijakan itsbat nikah dimanfaatkan juga oleh pasangan suami istri yang menikah dengan cara siri dan perkawinan campuran guna memudahkan proses administrasi perkawinan sehingga dampaknya mengurangi kesadaran hukum masyarakat dalam bidang hukum perkawinan dan adanya indikasi pemanfaatan celah hukum oleh warga Negara asing dalam menikahi wanita Indonesia guna menghindari syarat administrasi perkawinan.¹²

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Adriaan Bedner & Stijn van Huis dengan judul *Plurality of marriage law and marriage registration for Muslims in Indonesia: a plea for pragmatism*. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa *“As a result, the potential disadvantages from the human rights approach as coined by Merry and others seem to be absent. The Marriage Law does not mean a clear break with the past, by introducing a secular, same rights type of marriage and divorce. The practices developed on the basis of this law and the typically pragmatic way in which*

¹² Yusriyah, *Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Itsbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas)*, alhamra jurnal studi islam, Volume 1, No. 1, Februari, 2020: 69-80

religious courts and officials close to the grassroots have responded to local situations have further reinforced a practice that to a large extent accommodates women's rights. This applies at least if one focuses on outcomes instead of on the patriarchal terms and the nominal differentials between men and women used in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law."

Kesimpulan dalam penelitian-penelitian yang telah disebutkan diatas meneliti bahwa tentang bagaimana dampak dari pernikahan siri. Namun dalam penelitian yang kami lakukan disini menggali bagaimanakah dampak Itsbat nikah terhadap Penerapan UU No. 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan.

F. Definisi Oprasional

1. Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri itsbat dan nikah, kata itsbat berasal dari bahasa Arab yaitu الثبات yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Sedangkan nikah secara bahasa berarti الوطء والوهو artinya "*bersenggama atau bercampur*". Para ulama' ahli fikih berbeda pendapat tentang

makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fikih yaitu akad nikah yang ditetapkan oleh syara' sehingga seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.¹³

Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah.

Tetapi pernikahan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab Fikih klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat Itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat

¹³ Ahmad Fauzi, "Itsbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri," *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 9 (2021): 978–984.

nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.¹⁴

Kata berasal dari kata latin *existere*, dari *ex*= keluar, *sitere*= membuat berdiri yang artinya apa yang ada, apa yang memiliki aktualitas, apa saja yang dialami. Konsep ini menekankan bahwa sesuatu itu ada. Menurut Durkheim arti (keberadaan) adalah “*adanya*”. Dalam filsafat, istilah diberikan arti baru, yaitu sebagai gerak hidup dari manusia konkret.¹⁵ Di sini kata diturunkan dari kata kerja latin *ex-sistera*. Berada (*to exist*) artinya muncul atau tampil keluar dari suatu latar belakang sebagai sesuatu yang benar-benar ada. Dalam kamus kata serapan, Martinus mengungkapkan bahwa

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Durkheim, Emile, *The Rules of Sociological Method*, (London: Macmillan, 1982), hlm. 29–163.

adalah hal, hasil tindakan, keadaan, kehidupan semua yang ada. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa “*adanya*” yang dimaksud adalah keberadaan sesuatu dalam kehidupan. Unsur dari tersebut meliputi lahir, berkembang dan mati.

G. Landasan Teori

A. Pengertian Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁶

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan

¹⁶ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan Kaidah-Kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa Kaidah-Kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari Kaidah-Kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa Kaidah-Kaidah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui

dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.¹⁷

B. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁸

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40.

¹⁸ Soerdjono. *Benerapa Permasalahan*, h. 45.

tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹⁹

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum diantaranya:

- a. Faktor Hukumnya sendiri
- b. Faktor Penegak Hukum
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

¹⁹ Soerdjono. Benerapa Permasalahan, h. 45.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa.²⁰ Jenis penelitian metode kualitatif dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai Dampak Itsbat Nikah Terhadap Penerapan Uu No. 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dengan informasi tersebut kemudian digambarkan menggunakan teori sosiologi hukum. Selain itu, dengan menggunakan metodologi kualitatif diharapkan dapat ditemukan berbagai situasi dan masalah mengenai Dampak Itsbat Nikah Terhadap Penerapan UU No. 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Subyek penelitian

Pada penelitian kualitatif responden atau subyek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti

²⁰ T. Fatimah Djajasudarma, *MetodeLinguistik (Ancangan Metode Penelitian dan Kajian)*,(Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 11

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci yaitu beberapa pasangan yang mengajukan itsbat nikah, dan hakim yang menangani kasus itsbat nikah.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah sesuatu yang secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komprehensif. Objek di dalam riset adalah variabel yang diteliti di tempat riset yang dilakukan. Adapun objek penelitian yang penulis teliti adalah pasangan yang mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari bentuk kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari informan, dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah, pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di Pengadilan Agama Pacitan. Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi yang merupakan satu metode yang di gunakan para peneliti untuk meninjau secara cermat dan

langsung di lokasi penelitian. Jadi penulis mengamati tentang kebenaran dari suatu kondisi yang terjadi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Biasanya data sekunder bersumber dari buku, jurnal, publikasi pemerintah, serta sumber lain yang mendukung dengan penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²¹ Wawancara juga cara yang paling efektif untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, t.th, h. 204

mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan, selain itu juga kepada Hakim yang mengadili perkara itsbat nikah. Terdapat dua jenis wawancara yang dapat dilakukan dalam penelitian, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang sudah dipersiapkan format berupa pedoman wawancara sehingga daftar pertanyaan kepada informan tidak akan melenceng dari topic penelitian. Sedangkan wawancara tidak struktur merupakan teknik pengumpulan data berupa instrument penelitian dengan tidak memperhatikan panduan meski telah dibuat, sehingga dalam peertanyaan lebih terasa santai. Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur untuk menggali informasi seputar pengaruh Itsbat nikah terhadap Pencatatan Pernikahan. Pada penelitian ini terdapat dua informan yaitu informan ahli dan informan pembanding. Adapun informan ahli sebagai berikut:

NO	NAMA INFORMAN AHLI	JABATAN
1	Dra. Nurhabibah	Hakim Pengadilan Agama Pacitan
2	Drs Miswan,	Hakim Pengadilan Agama Pacitan

	M.H.	
--	------	--

Table 1.1 Informan Ahli

Sumber : Olahan peneliti

Penentuan informan ahli berdasarkan pada pokok pembahasan pada penelitian ini yaitu tentang dampak peraturan itsbat nikah terhadap penerapan UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan. Seorang hakim merupakan orang yang paling berpengaruh pada Pengadilan Agama dan juga ia merupakan pimpinan di Pengadilan Agama. Selain itu juga penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Pacitan.

Adapun daftar infoman Pembanding sebagai berikut:

NO	NAMA INFORMAN AHLI	JABATAN
1	Drs.Wahyudin MH.	Panitera Pengadilan Agama Pacitan
2	Moch Mu'ti, S.H.	Panitera Pengadilan Agama Pacitan
3	Wagiman	Pihak yang mengajukan Itsbat Nikah
4	Amir handoko	Pihak yang mengajukan Itsbat Nikah

5	Rara	Korban dari pernikahan siri
6	Jumiati	Korban dari pernikahan siri

Table 2.1 Informan Pembanding

Sumber : Olahan peneliti

Penentuan informan pembanding ini sebagai alat untuk triangulasi data dengan menggunakan sumber dari yang berbeda. Yaitu berasal dari panitera dan juga pihak-pihak yang telah mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

b. Observasi

Penggunaan teknik dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari teknik observasi dan wawancara. Dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk.²²

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil data tertulis melalui dokumen-dokumen ataupun tulisantulisan yang berhubungan

²² Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 108.

dengan penelitian, adapun data tertulis melalui dokumen yang ingin peneliti kumpulkan adalah data tentang bagaimana Dampak Itsbat Nikah Terhadap Penerapan Uu No. 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi di Pengadilan Agama Pacitan).

c. Dokumentasi

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akibar, observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²³ Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia dalam kenyataan. Dengan observasi diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial masyarakat yang menjadi objek penelitian.²⁴ Sebagai alat pengumpul data, observasi dilakukan secara sistematis, yakni pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan- aturan tertentu sehingga dapat diulangi

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodeologi Penelitian Sosial* Ed. II (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 52.

²⁴ S. Nasution, *Metode Penelitian (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket* (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 107

kembali oleh peneliti lain. Selain itu, hasil observasi harus memberi kemungkinan untuk menafsirkannya secara ilmiah.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Matthew B. Milles terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.²⁶ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pengolahan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian. Reduksi data merupakan bagian analisis data sehingga dapat diartikan juga sebagai proses membuang data yang tidak perlu, mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat berhasil diverifikasi. Proses reduksi data dan juga transformasinya ini terus berlanjut sampai laporan akhir penelitian berhasil tersusun lengkap.

²⁵ Ibid., 113

²⁶ Matthew B. Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.), Jakarta: UI Press, 1992, h. 15.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian Data merupakan rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan guna mempermudah data-data yang telah dikumpulkan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

c. Verifikasi dan Pengegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Dalam penelitian ini proses verifikasi dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Saat memasuki obyek penelitian (lapangan) serta selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha menganalisis serta mencari arti dari data yang terkumpul, yakni mencari pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat serta proposisi.²⁷

Dengan demikian, peneliti dalam proses verifikasi hasil temuan ini dapat saja berlangsung singkat dan dilakukan peneliti sendiri, yaitu dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil-hasil temuan terdahulu dan melakukan cek

²⁷ Ibid.,19

silang dengan temuan yang lainnya. Temuan yang didapat, atau diverifikasi hasil temuan ini kembali kelapangan. Dengan melakukan verifikasi, peneliti dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan realibitas hasil temuan.

6. Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan. 1. *Credibility Uji credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

Dalam upaya pengecekan pembenaran data, banyak cara yang digunakan untuk mengetahui, bahwa data yang diperoleh adalah yang sesungguhnya seperti yang terjadi dilapangan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan satu cara untuk menguji keabsahan data, yaitu teknik triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*),

dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Peneliti merasa perlu menggunakan teknik ini, karena langsung dapat direkomendasikan dari hasil pengumpulan data penelitian, ketika berada dilapangan. Pengecekan sumber data yang menggunakan triangulasi sumber data dengan pengecekan dari beberapa sumber, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya diminta kesepakatan dengan beberapa sumber data tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut dan sistematis, maka peneliti membagi pokok bahasan menjadi Lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan.

Adapun perincian setiap bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang, rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kajian Pustaka, Definisi Operasional, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II dalam bab ini menjelaskan pemaparan tentang teori Sosiologi hukum, Obyek kajian Sosiologi Hukum.

BAB III Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Berisi tentang profil Pengadilan Agama Pacitan, dan SOP Pengadilan Agama Pacitan.

BAB IV Faktor-faktor yang menyebabkan itsbat nikah di Kabupaten Pacitan. Bab ini berisi tentang penjabaran dari rumusan masalah yaitu Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan itsbat nikah di Kabupaten Pacitan, Bagaimana prosedur itsbat nikah Di pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dan Bagaimana Implikasi dari Itsbat nikah terhadap Penerapan UU No. 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan.

BAB V Penutup merupakan akhir dari pembahasan ini yang berisi kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TEORI EFEKTIFITAS HUKUM

A. Pengertian Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁸

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak

²⁸ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan Kaidah-Kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa Kaidah-Kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari Kaidah-Kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa Kaidah-Kaidah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga

masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²⁹

Bagaimana Hukum di Indonesia sangat sulit untuk dijawab secara tepat dan bahkan sukar untuk mendekati ketepatan sekalipun. Beberapa gejala dapat dikemukakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta gambaran yang agak luas. Sejak tahun 1945 Indonesia telah mengalami proses transformasi di bidang hukum, sejak tahun tersebut antara lain telah banyak perundang-undangan baru yang diperlakukan, disamping banyaknya keputusan-keputusan badan-badan peradilan yang telah berbeda dengan yurisprudensi zaman colonial. Walaupun demikian, masih banyak Kaidah-Kaidah hukum dari zaman colonial yang tetap berlaku secara tegas maupun samar-samar, dan walaupun ada yang telah dihapuskan masih sulit untuk menghapuskan alam pikiran lama yang masih berorientasi pada system hukum di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh cita- cita baru yang timbul dan tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.

²⁹ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , h. 40.

Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai cirri-ciri social dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Lagi pula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan social dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, hal mana pada taraf-taraf tertentu menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie tersebut merupakan keadaan dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam arti mana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang baik dan mana yang buruk. Keadaan ini bertambah parah pada periode berikutnya terutama sebelum tahun 1966. Revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945 tidaklah secara menyeluruh menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman colonial. Kalaupun ada yang dihapuskan, maka belum ada hukum penggantinya, halmana terutama disebabkan oleh karena tujuan utama daripada

revolusi fisik adalah untuk mencapai dan mempertahankan hukum kemerdekaan.

Kelemahan-kelemahan sistem hukum lama yang berasal dari zaman colonial baru disadari pada awal tahun enam puluh, akan tetapi semenjak itu, kehidupan dan perkembangan hukum tidaklah begitu menguntungkan oleh karena adanya eksploitasi dari kegiatan-kegiatan politik. Periode 1960-1965 ditandai dengan menurunnya wibawa hukum, sehingga para warga masyarakatpun pudar kepercayaannya terhadap hukum. Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cepat, bersifat kompleks dan bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai, struktur social, lembaga-lembaga politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan. Perubahan-perubahan yang kemudian mengikutinya pada tahap-tahap berikutnya lebih merupakan proses reformasi yang terutama bertujuan untuk membina serta mengembangkan dasar-dasar serta nilai-nilai baru yang dihasilkan oleh revolusi. Pekerjaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelopor reformasi jelas lebih sulit, oleh karena lebih banyak menyangkut masalah-masalah konsolidasi,

pembinaan dan pengembangan, dalam proses mana dia seringkali harus berhadapan dengan unsure-unsur masyarakat masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya.

Periode menurunnya kewibawaan hukum mengalami perubahan-perubahan setelah bagian-bagian masyarakat dengan dipelopori oleh para mahasiswa berhasil untuk menghentikan legitimasi pemerintahan di bawah pimpinan (alm) Ir. Soeharto. Kepercayaan masyarakat terhadap wibawa hukum secara perlahan-lahan mulai pulih, walaupun belum sepenuhnya. Pada masa itulah mulai terdengar suara-suara dari berbagai golongan masyarakat yang antara lain menginginkan ditegakkannya kembali supremasi hukum atau yang lebih dikenal dengan sebutan penegakan kembali rule of law. keadaan ini terutama disebabkan oleh karena masyarakat telah sampai pada puncak penderitaannya karena keadaan ekonomi yang parah serta ketiadaan kependeritaannya karena keadaan ekonomi yang parah, serta ketidadaan ketertiban di dalam arti tidak adanya kepastian tentang apa yang menjadi wadah hak-hak dan kewajiban-kewajiban para warga masyarakat.

Dengan demikian maka untuk mengakhiri kepincangan-kepincangan tersebut, antara lain, diperlukan usaha-usaha untuk menegakkan kembali *rule of law*, masalahnya tidak semudah itu, kiranya perlu ditegaskan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan *rule of law* tersebut. Istilah atau pengertian *rule of law* paling sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materiil (ideologis). Di dalam arti yang formil, maka *rule of law* dimaksudkan sebagai kekuasaan public yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap system Kaidah Kaidah yang didasarkan pada hirarki perintah merupakan *rule of law*. Dalam arti yang formil ini, maka *rule of law* mungkin menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis.

- a. *Rule of law* dalam arti materiil atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk yang antara lain mencakup aspek-aspek sebagai berikut: Ketaatan dari segenap warga masyarakat terhadap kaeda-Kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislative, eksekutif dan yudikatif.
- b. Kaidah-Kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak azasi manusia.

- c. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi social yang meungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
- d. Terdapat tata cara yang jelas dalam proses mendapatkan keadilan terhadap perbuatan yang sewenang-wenang dari penguasa.
- e. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan eksekutif dan legislative.³⁰

B. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (*ajeg*). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga

³⁰Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis, (Jurnal Hukum, Vol. IV, 7), h. 57- 70.

hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.) Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan.

Yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan.

Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Ada beberapa factor yang mempengaruhi keefektivan hukum

1. faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret

berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas. utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang. Menurut Prof. Dr. Achmad Ali apa yang adil bagi si Baco belum tentu di rasakan adil bagi si Sangkala. Mengenai faktor hukum dalam hal ini dapat diambil contoh pada pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimumnya sajam, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman dimana ia dapat bergerak dalam batas-batas maksimal hukuman. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu terlalu ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan

dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan suatu penghambat dalam penegakan hukum tersebut.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kejahatan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya

memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kejahatan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan kepolisian, kemudian diajukan oleh kejaksaan ke pengadilan dan dalam pemeriksaan di pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum. Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kejahatan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “crimes without victims”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana. Karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan

wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut:

1. peranan yang ideal / ideal role;
2. peranan yang seharusnya / expected role;
3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri / perceived role;
dan
4. perana yang sebenarnya dilakukan / actual role.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-

pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

1) Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

2) Kejaksaan,

Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI.

3) Kehakiman,

Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan hakim

4) Lembaga pemasyarakatan,

Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2005 tentang pemasyarakatan. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain :

- a) istitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain :

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme. Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain : sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.

D. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan.

3. Yang kurang seharusnya di tambah.
4. Yang macet harus di lancarkan.
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.

Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya

aparatus penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia. Hal itu dapat kita lihat misalnya pada insatasi kepolisian, di mana saat ini hampir bisa dikatakan dalam hal fasilitas pihak kepolisian sudah dapat dikatakan mapan, tapi berdasarkan survey yang dilakukan oleh Lembaga Transparency International Indonesia menyatakan bahwa instansi terkorup saat ini ada di tubuh kepolisian dengan indeks suap sebesar 48 %, bentuk korupsi yang terjadi di tubuh kepolisian, itu contohnya saja seperti korupsi kecil-kecilan oleh Polisi Lantas yang mungkin sering dialami oleh pengendara, sampai ke tingkat yang lebih tinggi semisal tersangka kasus korupsi Susno.

Begitu juga Dalam lingkup pengadilan dan kejaksaan pun tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di institusi kepolisian.

1. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapatpendapat tertentu mengenai

hukum.³¹ Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga

³¹ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), h. 87.

mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cermin dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undangan yang ada / berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit.

Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang

bersinambungan dan senan tiasa dievaluasi hasil-hasinya, untuk kemudian dkembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya kan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

2. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik

(hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.

3. Berlakunya Hukum

a. Secara filosofis

Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.

b. Secara yuridis

Berlakunya hukum secara secara yuridis, dijumpai anggapan anggapan sebagai berikut:

1) Hans kelsen,

Yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penetuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen

2) W. Zevenbergen,

Menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “op de verischte ize is tot sand gekomen.

c. Secara sosiologis

Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila Kaidah tersebut efektif, artinya, Kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima

oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau Kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.



BAB III

GAMBARAN UMUM

LOKASI PENELITIAN

A. Profil Kabupaten Pacitan

Kabupaten Pacitan terletak di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan kapur, yakni bagian dari rangkaian Pegunungan Kidul. Tanah tersebut kurang cocok untuk pertanian. Pacitan juga dikenal memiliki gua-gua yang indah, diantaranya Gua Gong (gua terindah se-Asia Tenggara), Tabuhan (batu dapat dipukul dan berbunyi seperti alat musik gamelan), Kalak (gua pertapaan), dan Luweng Jaran (diduga sebagai kompleks gua terluas di Asia Tenggara). Di daerah pegunungan seringkali ditemukan fosil manusia purba dan alat – alat purbakala. Secara astronomis, Kabupaten Pacitan berada pada $110^{\circ} 55'$ – $111^{\circ} 25'$ Bujur timur dan $7^{\circ} 55'$ – $8^{\circ} 17'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Pacitan adalah 1.389,87 km², yang dibagi menjadi 12 kecamatan. Pusat pemerintahannya ada di Kecamatan Pacitan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Pacitan dikenal dengan nama Kabupaten Pariwisata atau Kabupaten Seribu Goa. Hal ini dikarenakan kekayaan alam dan ekstika Pacitan yang sungguh luar biasa dan sangat memikat para pengunjung. Pariwisata di Pacitan terdiri dari Wisata Goa, Wisata Pantai, Wisata Pegunungan (hikking), Wisata Sejarah, Wisata Pemandian Alam dan yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian kawasan olahraga yang nantinya bisa menjadi salah satu alternatif tempat yang bisa dikunjungi di Pacitan.

Kondisi geografis Pacitan yang sebagian besar berbukit tandus menyebabkan daerah ini kurang cocok untuk bercocok tanam padi sehingga ketela pohon atau singkong menjadi alternatif sejak dahulu. Hasil pertanian utama Pacitan adalah padi, singkong, cengkeh, kelapa dan kakao yang baru

dibudidayakan beberapa tahun terakhir. Potensi bahan tambang juga cukup besar di kawasan Pacitan. Kerajinan batu akik yang terpusat di kawasan Donorojo, sedikit banyak telah menyumbang nilai penting bagi Pacitan.

B. Sejarah Kabupaten Pacitan

Sejarah Pacitan umumnya ditulis berawal dari kedatangan Ki Buwana Keling, salah satu utusan Raja Brawijaya ke daerah di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah ini, pada abad ke XII M. Menurut silsilah, asal usul KI Ageng Buwana Keling adalah putra Pejajaran yang di kawinkan dengan salah satu putri Brawijaya V yang bernama putri Togati. setelah menjadi menantu Majapahit maka KI Ageng Buwana Keling mendapat hadiah tanah di pesisir selatan dan di haruskan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Pusat pemerintahan Negeri Buwana Keling terletak di \pm 7 km dari ibukota Pacitan sekarang (Jati Kec. Kebonagung) yang disebut daerah wengker kidul atau daerah pesisir selatan. KI Ageng Buwana Keling berputra tunggal bernama Raden Purbengkoro yang setelah tua bernama KI Ageng Bana Keling.

Keberadaan Ki Ageng Buwana Keling ini dikuatkan dengan prasasti jawa kuno yang diduga dibuat pada abad XV

yang menyebutkan bahwa Ki Ageng Buwono Keling merupakan penguasa di daerah wengker kidul.

PRASASTI JAWA KUNO

JA PURA PURAKSARA ERESTHA

BHUWANA KELING ABHIYANA

JUWANA SIDDHIM SAMAGANAYA

BHIJNA TABHA MINIGVAZAH

RATNA KARA PRAMANANTU

Artinya : dahulu ada seorang pendekar ternama bernama buwono keling yang telah mencapai kesempurnaan, dalam ilmu kebathinan dan kekebalan. Seorang guru diantara orang bijaksana dan beliau inilah yang menjadi perintis dan pemakrarsa daerah sekitarnya.

Versi lain menyatakan bahwa Ki Ageng Buwono Keling ini adalah saudara seperguruan Ki Tunggul Wulung, salah seorang kepercayaan Prabu Brawijaya V. Ceritanya dimulai pada saat menjelang kemunduran Kerajaan Majapahit di masa pemerintahan Prabu Brawijaya V yang menikah dengan puteri dari China. Dalam kepercayaan kala itu siapa saja wangsa Jawa yang menikahi puteri China dia akan mengalami kekalahan dalam segala hal. Prabu Brawijaya V

menyadari hal tersebut, beliau kemudian menyiapkan seseorang untuk berjaga-jaga bila huru-hara benar-benar terjadi. Seseorang yang dipersiapkan tersebut ialah Ki Tunggul Wulung. Brawijaya V menyuruh Ki Tunggul Wulung untuk bersemedi di Gunung Lawu, selanjutnya ke Gunung Limo.

Di saat itulah Agama Islam masuk ke tanah Jawa lewat daerah pesisir utara Pulau Jawa, karena tidak ingin masuk Islam ketiga saudara Ki Tunggul Wulung yaitu Ki Brayut, Ki Buwono Keling dan Ki Tiyoso (mereka berempat bukan saudara kandung melainkan saudara satu perguruan) melarikan diri ke daerah selatan sesuai dengan petunjuk gurunya, “Berjalanlah selama 40 hari dan setelah mencapai tempat yang tinggi lihatlah kearah bawah bila kalian melihat tempat yang datar, tempat itulah yang dinamakan “Alas Wengker Kidul”. Seampainya di Wengker Kidul perjalanan mereka dibagi menjadi tiga yaitu, Ki Buwono Keling lewat sebelah utara, Ki Tiyoso lewat pesisir selatan dan Ki Brayut lewat tengah hutan.

Saat kemudain Majapahit benar-benar mengalami huru-hara besar dan Ki Tunggul Wulung turun gunung, ternyata beliau tidak bisa memadamkan huru-hara tersebut. Kemudian Ki tunggul Wulung memutuskan untuk mencari ketiga saudara

seperguruannya dengan meminta petunjuk dari Sang Guru namun Sang Guru dalam keadaan kritis dan dalam hembusan nafas terakhirnya ia berpesan untuk menggali makam dengan tongkatnya.

Setelah peristiwa tersebut Ki Tunggul Wulung mencari ketiga saudaranya dan sampailah di tempat yang dinamakan Astono Genthong, dari situ ia melihat gunung yang berjajar empat (kelak terkenal dengan sebutan Gunung Limo, tetapi tidak terlihat sebagai lima gunung bila dilihat dari Astono Genthong). Kemudian ia mempunyai firasat bila saudaranya berada di gugusan gunung tersebut, namun sesampainya di gunung tersebut ia tidak bertemu saudaranya.

Dikisahkan bahwa akhirnya Kyai Tunggul Wulung membuka lahan atau babad alas disekitar lereng gunung Limo. Salah satu dari gugusan gunung yang berjumlah lima merupakan tempat untuk bertapa atau bersemedi. Untuk mencapai lokasi pertapaan harus melewati banyak rintangan seperti tangga (ondo rante) selain itu kita harus menembus hutan lebat, tebing yang terjal serta Selo Matangkep.

Selo Matangkep adalah sebuah celah sempit diantara batu besar yang hanya cukup dilewati sebadan orang saja,

dipintu masuk Selo Matangkep tersebut dipercaya apabila ada pengunjung yang berniat jahat maka ia tidak akan bisa melewatinya, sementara itu bagi yang berniat baik untuk berkunjung ke pertapaan kendati ia berbadan besar maupun kecil akan bisa melewatinya.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Itsbat Nikah Di Kabupaten Pacitan

Untuk menggali tentang faktor-faktor yang menyebabkan itsbat nikah di Kabupaten Pacitan peneliti menggali sumber tersebut dengan menentukan beberapa informan ahli dari hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan yang mana hakim tersebut merupakan orang yang paham dan mengetahui langsung tentang proses pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan. Setelah menentukan informan ahli selanjutnya peneliti menentukan informan pembanding. Informan pembanding ini peneliti gunakan sebagai triangulasi data, yang mana data yang diperoleh dari sumber informan ahli tersebut peneliti cek kebenarannya melalui informan pembanding yang sudah peneliti tentukan. Untuk informan pembanding peneliti mengambil pegawai atau panitera Pengadilan Agama Pacitan dan pihak-pihak yang mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut.

Setelah menentukan informan selanjutnya peneliti menentukan bahan pertanyaan yang peneliti gunakan sebagai wawancara kepada informan-informan yang sudah ditentukan. Adapun wawancara tersebut langsung mengarah ke topik pembahasan yaitu Faktor-faktor apa saja yg menyebabkan itsbat nikah di Kabupaten Pacitan?.

Adapun daftar infoman ahli sebagai berikut:

NO	NAMA INFORMAN AHLI	JABATAN
1	Dra. Nurhabibah	Hakim Pengadilan Agama Pacitan
2	Drs Miswan, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Pacitan

Adapun daftar infoman Pembanding sebagai berikut:

NO	NAMA INFORMAN AHLI	JABATAN
1	Drs. Wahyudin MH.	Panitera Pengadilan Agama Pacitan
2	Moch Mu'ti, S.H.	Panitera Pengadilan Agama Pacitan

3	Wagiman	Pihak yang mengajukan Itsbat Nikah
4	Amir handoko	Pihak yang mengajukan Itsbat Nikah

Menurut informan ahli yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi itsbat nikah di Kabupaten Pacitan dikarenakan pernikahan yang telah dilakukan di luar Kabupaten Pacitan atau di perantauan kemudian setelah Kembali ke Kabupaten Pacitan mereka mengajukan pernikahan tersebut. Selain itu juga dikeranakan tidak memiliki biaya yang cukup untuk melangsungkan pernikahan sehingga mereka menikah secara siri kemudian mendaftarkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan. Seperti yang dijelaskan oleh Dra. Nurhabibah sebagai berikut:

“factor-faktor yang menyebabkan itsbat nikah di Kabupaten Pacitan itu biasanya karena menikah siri di Perantauan kemudian Ketika pulang mereka mendaftarkan itsbat nikah ke Pengadilan, ada juga yang menikah siri karena tidak memiliki biaya setelah memiliki anak mereka mendaftarkan itsbat nikah di Pengadilan. Dikarenakan kalau mengurus akte anak, KK dan administrasi negara akan kesusahan kalau tidak memiliki buku nikah bagi yang sudah kawin.”³²

³² Dra. Nurhabibah, 15.17 WIB 27 Oktober 2022 di Kantor Pengadilan Agama Pacitan

Setelah melakukan wawancara kepada informan ahli yang pertama selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan yang kedua. Menurut informan yang kedua faktor yang menyebabkan pernikahan siri di Kabupaten Pacitan dikarenakan pernikahan siri, selain itu juga pernikahan yang dilakukan dengan sebelum tahun 1974 bahkan terdapat juga pernikahan siri yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur. Seperti yang dijelaskan oleh Drs Miswan, M.H. sebagai berikut:

*“faktor-faktor yang menyebabkan itsbat nikah di Kabupaten pacitan itu kebanyakan disebabkan dari pernikahan siri. Selain itu biasanya pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974. Karena mereka ingin mengurus persyaratan-persyaratan tertentu maka dari itu mereka mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan. Bahkan ada juga yang mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan dengan alasan pernikahan siri yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur”.*³³

Setelah melakukan wawancara kepada informan ahli selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan pembanding. Tujuan dari wawancara kepada informan

³³ Drs Miswan, M.H., 15.17 WIB 27 Oktober 2022 di Kantor Pengadilan Agama Pacitan

pembandingan yaitu sebagai bahan triangulasi data yang mana bertujuan untuk mengecek kebenaran informasi yang peneliti peroleh dari informan ahli.

Menurut informan pembandingan yaitu Drs.Wahyudin MH. faktor-faktor yang menyebabkan permohonan itsbat nikah di Kabupaten Pacitan dikarenakan adanya pernikahan siri, selain pernikahan siri ada yang dikarenakan pernikahannya tidak tercatat di KUA. Seperti yang dijelaskan oleh Drs.Wahyudin MH. sebagai berikut:

*“biasanya kalau faktor-faktor yang menyebabkan itsbat nikah itu paling banyak ya pernikahan siri. Entah kenapa mereka menikah secara siri. Tapi ada lagi yang pernikahannya tidak tercatat di KUA . ya hamper sama dengan pernikahan siri sebenarnya”.*³⁴

Setelah melakukan wawancara kepada informan pembandingan yang pertama selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan pembandingan yang kedua. Pada kali ini peneliti masih melakukan wawancara kepada panitera Pengadilan Agama Pacitan yang mana informan tersebut merupakan orang yang mengetahui langsung dari pengajuan

³⁴ Drs.Wahyudin MH., 15.17 WIB 27 Oktober 2022 di Kantor Pengadilan Agama Pacitan

itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan. Menurutnya faktor-faktor yang menyebabkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan itu dikarenakan pernikahan siri yang dilakukan oleh pasangan. Pernikahan siri tersebut ada yang dilakukan di Kabupatenupten Pacitan dan ada yang dilakukan diluar Kabupaten Pacitan ketika di tempat perantauan. Selain itu ada yang mengajukan permohonan itsbat nikah disebabkan dari pernikahan yang tidak tercatat di KUA yang dilaksanakan sebelum diberlakukannya peraturan Undang-undang 1974. Seperti yang dijelaskan oleh Moch Mu'ti, S.H. sebagai berikut:

*“permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan itu kebanyakan dari faktor pernikahan siri. Ada yang pernikahan siri dilakukan di Kabupaten Pacitan ada juga yang dilakukan diluar Kabupaten Pacitan. Bahkan ada yang dilakukan oleh pasangan nikah dibawah umur. Selain itu juga ada yang dikarenakan pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 1974 yaitu sebelum diberlakukannya Undang-undang perkawinan.”*³⁵

Setelah melakukan wawancara kepada kedua informan pembanding selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan pembanding yang ketiga. Pada informan pembanding

³⁵ Moch Mu'ti, S.H., 15.17 WIB 27 Oktober 2022 di Kantor Pengadilan Agama Pacitan

yang ketiga ini peneliti mengambil pihak-pihak yang melakukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan. Menurutnya faktor-faktor yang menyebabkan Itsbat nikah yang dia lakukan adalah pernikahan siri. Pernikahan yang dilakukannya di perantauan ketika dia pulang dari perantauan mereka mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pacitan untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Wagiman sebagai berikut:

“kalau saya dulu mengajukan permohonan itsbat nikah dikarenakan untuk mengurus persyaratan penggabungan Kartu Keluarga saya dengan istri saya. Sebenarnya dulu saya merantau ke jambi disana saya berada di Hutan yang jauh dari pemukiman. Setelah lama disana saya bertemu dengan seorang wanita dan saling suka kemudian saya menikah secara siri. Dan pada saat itu istri saya sedang hamil kemudian saya kembali ke Rumah bersama istri saya akantetapi berhubung tetangga tidak ada yang mengetahui apakah itu istri sah saya atau bukan maka saya mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan. Agar saya memiliki bukti yang kuat bahwa saya sudah menikah dengan istri saya.”³⁶

³⁶ Wawancara Moch Mu'ti, S.H., 15.17 WIB 29 Oktober 2022 di Rumah Moch Mu'ti, S.H. Pacitan

Setelah melakukan wawancara kepada ketiga informan pembanding selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada informan pembanding yang keempat yaitu dengan Amir handoko. Amir handoko merupakan orang yang mengajukan itsbat nikah di bawah umur. Seperti yang dijelaskan oleh Amir handoko mereka mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pacitan dikarenakan pernikahan siri yang telah dilakukannya pada umur 16 tahun. Ketika masih duduk di bangku SMP kelas 3 mereka menikah alasan mereka menikah di usia tersebut dikarenakan sudah hamil diluar nikah. Dalam kondisi kelas 3 SMP pihak sekolahan tidak menerima siswa yang sudah bersuami istri atau menikah sehingga mereka dihadapkan kedua pilihan memilih menikah tapi tidak mendapatkan ijazah SMP atau memilih ijasah SMP tetapi mereka di hukum oleh warga masyarakat. Setelah pada kasus tersebut mereka menikah secara siri agar mendapatkan ijazah akantetapi setelah mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama setelah lulus SMP masih ditolak dikarenakan di bawah umur. Seperti yang dijelaskan oleh Amir handoko sebagai berikut:

“saya melakukan itsbat nikah itu dikarenakan pernikahan siri yang saya lakukan ketika masih SMP. Pada waktu itu saya menghamili pacar saya yang masih duduk di kelas 3 SMP juga sekelas dengan saya akantetapi saya mendapatkan sangsi dari pihak sekolahan apabila tidak menutupi kasus tersebut atau menikah secara terang-terangan maka saya tidak mendapat ijazah atau dikeluarkan dari sekolah. Dan pada akhirnya saya menikah secara siri karena masyarakat tetangga pacar saya sudah mengetahui kalau saya menghamilnya sehingga saya dipaksa bertanggungjawab atas bayi dalam kandungan tersebut. Kemudian saya menikah siri dan setelah satu tahun berjalan saya lulus SMP kemudian saya mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan akantetapi di tolak karena masih dibawah umur.”³⁷

Setelah melakukan wawancara kepada informan ahli dan juga wawancara kepada informan pembanding maka peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan yaitu disebabkan dari pernikahan siri selain itu juga disebabkan dari pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan yang dilakukan sebelum undang-undang 1974 tentang perkawinan di berlakukan. Selain itu juga menurut data dari pengadilan Agama Pacitan sebagai berikut:

³⁷ Wawancara Amir handoko. 15.17 WIB 28 Oktober 2022 di Rumah Amir handoko

No	No Perkara	Tahun	Alasan	Penetapan
1	26/Pdt.P/2017/PA.Pct	2017	Pemohon sudah meninggal sekaligus penetapan ahli waris	Dicabut
2	83/Pdt.P/2018/PA.Pct	2018	Siri	Dicabut
3	91/Pdt.P/2018/PA.Pct	2018	Siri	Dicabut
4	64/Pdt.P/2019/PA.Pct	2019	Surat nikah tidak tercatat	Dikabulkan
5	230/Pdt.P/2021/PA.Pct	2021	Siri	Dicabut
6	258/Pdt.P/2021/PA.Pct	2021	Siri dan masih dibawah umur	Tidak diterima (NO)
7	345/Pdt.P/2021/PA.Pct	2021	Siri	Dicabut
8	3/Pdt.P/2022/PA.Pct	2022	Tahun 1974	Dikabulkan
9	66/Pdt.P/2022/PA.Pct	2022	Siri	Dikabulkan
10	319/Pdt.P/2022/PA.Pct	2022	Tahun 1974	?
11	342/Pdt.P/2022/PA.Pct	2022	Siri dan masih	Dicabut

			dibawah umur	
--	--	--	--------------	--

Table 1.2 Permohonan Itsbat Nikah dari tahun 2017-2022

Sumber : Dokumen Pengadilan Agama Pacitan

Dari data di atas terdapat 7 pernikahan siri. 5 diantaranya di cabut, 1 di kabulkan dan 1 di tolak dikarenakan dibawah umur. Beberapa pertimbangan hakim dari putusan nikah siri sebagai berikut:

1. Pernikahan Siri yang dikabulkan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II yang didampingi atau diwakili oleh para kuasanya telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2022 yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Permohonan Itsbat Nikah di forum Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan; dan dari sebab para Penerima Kuasa telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat sehingga dapat dinyatakan sebagai advokat yang berhak melakukan praktik advokasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon I dan Pemohon II selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam di xxxxxxxx, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009, pernikahan mana telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terdapat sesuatu

hal yang dapat menghalangi pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II meminta agar pernikahan tersebut dapat ditetapkan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, telah pula dilakukan pengumuman sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan, dan hingga batas akhir dari pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang datang dan melaporkan keberatannya atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal pernikahan yang tidak tercatat maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dalam Pasal 7 ayat (3) telah dijelaskan alasan dapat diitsbatkannya suatu pernikahan secara limitatif;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan telah menikah secara Islam dan tidak terdapat halangan dalam pernikahan tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa permohonan a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu memeriksa apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; oleh karena itu berdasarkan maksud dari Pasal 163 HIR, maka Pemohon I dan Pemohon II kemudian dibebani dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa enam buah surat yang kemudian diberi kode P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah di-nazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa KTP Pemohon I dan Pemohon II, telah menerangkan tentang

identitas dan domisili Pemohon I dan Pemohon II. Bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat dan dikualifikasi sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Pacitan, sehingga dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Putusan Pengadilan Agama Pacitan dan bukti P.4 berupa Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pacitan, menerangkan telah terjadinya perceraian antara Pemohon II dengan suaminya terdahulu terhitung sejak tanggal 28 November 2008 yang didahului dengan kepergian suami Pemohon II tersebut meninggalkan Pemohon II selama lebih kurang tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat dan dikualifikasi sebagai akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon II dengan suaminya terdahulu telah resmi bercerai terhitung sejak tanggal 28 November 2008 yang

didahului dengan kepergian suami Pemohon II terdahulu meninggalkan Pemohon II selama lebih kurang tiga tahun lamanya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan; maka oleh karena satu-satunya bukti surat yang dapat membuktikan sahnya suatu pernikahan hanyalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan bahwa bukti P.5 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang mengindikasikan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, menerangkan bahwa ANAK II yang lahir pada tanggal xxxxxx adalah anak dari pasangan suami istri MANTAN SUAMI dan PEMOHON 2 (Pemohon II); padahal terhitung sejak tanggal 28 November 2008 antara MANTAN SUAMI dengan PEMOHON 2 (Pemohon II) telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menghadap dan memberikan kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah, bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, dan telah ternyata pula kesaksian yang disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya kedua saksi tersebut telah menjelaskan adanya hubungan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan adanya kesesuaian dan keterkaitan antara kesaksian kedua saksi tersebut dengan bukti-bukti surat yang senyatanya saling mendukung dan memperkuat satu sama lain, maka patut dinyatakan benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, meskipun kedua saksi tersebut hanya dapat menyebutkan bulan dan tahun dari pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun dengan memperhatikan fakta hadirnya kedua saksi dalam pernikahan tersebut, bahkan para saksi bertindak sebagai

saksi-saksi pada pernikahan tersebut, maka patut dinyatakan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah pada tanggal 19 Maret 2009 di xxxxxxxx, adalah benar dan untuk selanjutnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang ada tidaknya ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan secara khusus untuk sahnya perkawinan bagi orang yang beragama Islam telah diatur pada Bab IV dari Pasal 14 sampai dengan Bab VI hingga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena keduanya menghadiri prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka kesaksian yang disampaikan kedua saksi tersebut telah menjelaskan

secara utuh dan jelas tentang proses pernikahan tersebut yang telah dilaksanakan secara Islam, sehingga patut diyakini bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memberikan kesaksian yang menjelaskan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda (sebagaimana telah dikuatkan pula oleh bukti P.3 dan P.4); dan dalam pernikahan tersebut tidak ada pula halangan yang menurut hukum dapat mencegah terjadinya pernikahan, baik itu disebabkan oleh adanya hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan selama menjalani masa pernikahan tersebut tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya dan tidak pernah ada pula pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini, dan selama terikat tali pernikahan itu Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam; maka patut dinyatakan pula bahwa tidak ada sesuatu hal secara hukum yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta status Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terikat tali pernikahan dengan orang lain pada saat menikah serta dengan tidak adanya pula pihak lain yang memperlmasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini, maka fakta tersebut telah menafikan adanya kemungkinan penyeludupan hukum, seperti terjadinya poligami tanpa izin ataupun hal-hal lainnya, hingga patut dinyatakan bahwa tidak ada pula sesuatu hal yang secara hukum dapat mencegah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dan tidak adanya sesuatu hal menurut hukum dapat mencegah dan menghalangi pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan senyatanya Pemohon I dan Pemohon II yang kini masih terikat tali pernikahan juga tetap memeluk agama Islam, maka patut dinyatakan bahwa tidak terdapat sesuatu hal yang dapat menyebabkan ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut haram, fasad ataupun cacat hingga berakibat pada batalnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memberikan kesaksian yang menjelaskan bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I, umur lebih kurang 12 tahun dan ANAK II, umur lebih kurang 9 tahun; maka patut dinyatakan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Anak I, lahir di Pacitan pada tanggal xxxxxx dan Anak II, lahir di Pacitan pada tanggal xxxxxx, adalah benar dan untuk selanjutnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.6 tersebut di atas berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II yang menerangkan bahwa ANAK II yang lahir pada tanggal xxxxxx adalah anak dari pasangan suami istri MANTAN SUAMI dan PEMOHON 2 (Pemohon II); maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi kekeliruan dalam pencantuman nama ayah dari ANAK II karena terhitung sejak tanggal 28 November 2008 (sebagaimana bukti P.4) antara MANTAN SUAMI dengan PEMOHON 2 (Pemohon II) telah resmi bercerai; kekeliruan mana terjadi akibat dari kelalaian Pemohon II yang

tidak melaporkan kepada instansi terkait tentang telah terjadinya perceraian antara Pemohon II dengan MANTAN SUAMI, serta kelalaian Pemohon I dan Pemohon yang telah melakukan pernikahan secara di bawah tangan atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah ternyata bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dikehendaki dalam perkara ini, hingga ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 di xxxxxxxx, telah sesuai dengan hukum Islam, dan hingga kini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan masih terikat tali pernikahan serta telah pula dikaruniai dua orang anak dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al-Muhtaj Juz II terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa:

وَيُقْبَلُ إِفْرَازُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالتَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadis;*

Menimbang, bahwa dalam Kitab al-Anwar Juz II halaman 461 terdapat pula ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hukum Majelis Hakim bahwa:

وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ فُلَانَةٌ زَوْجِي وَمَا يُفَصِّلُ وَصَدَّقْتُهُ الْمَرْأَةُ أَوْ الْمُجْبِرُ كَفَى

Artinya: *Apabila seorang laki-laki berkata Fulanah adalah istriku dan ia tidak memerinci, dan perempuan yang dimaksud ataupun wali mujbir membenarkannya, maka telah cukup (pengakuan tersebut);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan cukup serta telah pula memenuhi maksud dan kehendak Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dinyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah berdasar hukumnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk di-itsbat-kannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka patut dinyatakan bahwa Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan a quo dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di xxxxxxxx, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa adapun terkait dengan kekeliruan pencantuman nama ayah dari ANAK II sebagaimana bukti P.6, maka oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 telah dinyatakan sah, dan ANAK II dilahirkan pada tanggal xxxxxx atau dalam masa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II; maka sesuai maksud Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Anak yang sah: a. Anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah”, ANAK II adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Sehingga dengan demikian, sudah seyogyanya Pemohon I dan Pemohon II melakukan perbaikan atas kekeliruan pencantuman

nama ayah sebagaimana pada bukti P.6 tersebut melalui instansi terkait guna menghindari terjadinya kerancuan nasab dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2009 di xxxxxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

2. Permohonan Itsbat nikah yang dicabut

Permohonan Itsbat nikah yang dicabut dikarenakan Pemohon menyatakan bahwa persyaratan untuk Isbat Nikah sampai hari ini belum lengkap, oleh karena itu para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya untuk mengurus persyaratan Isbat Nikah dahulu. Alasan pemohon mengajukan itsbat nikah dikarenakan pemohon akan melakukan perubahan Kartu Keluarga, akan tetapi dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan membutuhkan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Pacitan.

3. Permohonan Itsbat nikah yang di tolak

Permohonan Itsbat nikah yang ditolak dikarenakan masih dibawah umur. Pernikahan siri yang dilakukan di Bawah umur akan di tolak oleh pengadilan agama dikarenakan melanggar peraturan UU terkait batas usia menikah.

B. Prosedur Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan

Pada bab ini untuk mengetahui prosedur itsbat nikah maka peneliti melakukan penggalian sumber dari data-data yang berada di Pengadilan Agama Pacitan menurut sumber dari panitera sebagai berikut:

Prosedur pelaksanaan itsbat nikah :

1. Pemohon membuat surat permohonan itsbat nikah yang ditujukan kepada Ketua PA dan dilampiri berkas (Fotokopi KTP, Kartu Keluarga dan Surat keterangan dari KUA setempat yang menyatakan register nikah telah rusak/hilang/tidak tercatat dalam register)
2. Pemohon kemudian membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh Pengadilan.
3. Setelah perkara masuk dalam register perkara kemudian ditentukan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua PA, lalu Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Kemudian penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti oleh Panitera.

4. Setelah Majelis hakim ditentukan, kemudian Ketua Majelis menentukan hari sidangnya.
5. Setelah hari sidang ditentukan kemudian Ketua majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk mengantar surat panggilan (relaas) kepada Pemohon tentang hari sidang yang sudah ditentukan.
6. Pemohon hadir pada hari sidang yang telah ditentukan.
7. Majelis hakim yang bersidang (1 Ketua Majelis dan 2 hakim anggota) serta dibantu seorang Panitera/ panitera pengganti.
8. Ketika sudah jadwal sidang Pemohon dipanggil masuk untuk bersidang (untuk pemeriksaan permohonan, bukti dan saksi)
9. Pembacaan penetapan (Dikabulkan / dicabut / ditolak)

Selain itu prosedur itsbat nikah sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama yang dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut.³⁸

Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah

³⁸ Buku pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama , Mahkamah Agung Republik Indonesia. Edisi revisi 2010

- a) Aturan pengesahan nikah lisan, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
- b) Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.
- c) Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam).

- d) Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian.
- e) Untuk menghindari adanya penyelundupan hukwn clan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah hams berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah.
- f) Proses pengajuan, pemeriksaan clan penyelesaian permohonan pengesahan nikahlitsbatnikah hams memedomani hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah clan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukwn pemohon bertempat tinggal, dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.
 - 2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa

penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbatnikah, maka suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan upaya hukwn kasasi.

- 3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan istri atau suami yang tidak mengajukan pemohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijaclikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 5) Permohonan its'bat nikah yang dilakukan oleh anak,wali nikah clan pihak lain yang berkepentingan hams bersifat

kontensius, dengan mendudukkan suami dan istri dan/atau ahliwaris lain sebagai tennohon.

- 6) Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbatnikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), dapat mengajukan intervensi

kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

- 10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3), (4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.
- 11) Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahannikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media 149 massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.
- 12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.(hukum acara).

13) Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut: - "Menyatakan sah perkawinan antara . dengan yang dilaksanakan pada tanggal di

Sesuai dengan pemaparan data prosedur itsbat nikah di Pengadilan agama selanjutnya peneliti melakukan analisis dengan menggunakan prosedur itsbat nikah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut peraturan perUndang-undangan di Indonesia prosedur Itsbat nikah yang diberlakukan di Pengadilan Agama Pacitan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang di Indonesia. Seperti yang dijelaskan Pasal 7 dalam mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. menyangkut hal-hal yaitu: 1. Adanya perkawinan untuk mencapai penyelesaian perceraian 2. Surat nikah hilang 3. Keraguan salah satu syarat pernikahan 4. Adanya pernikahan sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 5. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki batas-batas perkawinan.³⁹

³⁹ Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, peradilan yang mengizinkan permohonan itsbat nikah serta mengesahkan dan mengakui pernikahan tidak dicatatkan sehingga pernikahan tersebut dapat menyuburkan nikah dibawah tangan pada masyarakat karena pengadilan agama dapat mengitsbatkan perkawinan yang tidak dicatatkan.



C. Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Penerapan UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan

Pada bab ini peneliti melakukan analisis tentang implikasi dari itsbat nikah terhadap penerapan UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan. Untuk mengetahui tentang implikasi itsbat nikah terhadap penerapan UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan pada point pertama peneliti menentukan beberapa indicator yang dapat digunakan peneliti sebagai bahan analisis.

Indikator pertama yaitu tentang faktor yang menyebabkan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan dari hasil wawancara dan data dari Pengadilan Agama Pacitan alasan pengajuan itsbat nikah dikarenakan pernikahan siri.

Indikator yang kedua yaitu tujuan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan adalah pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di

hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.⁴⁰

Selanjutnya isi dari UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan sebagai berikut:

Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU 1/1974 yang menyatakan:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU 1/1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat

⁴⁰ D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 142.

dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴¹

Setelah menentukan kedua indikator selanjutnya peneliti menganalisis dengan menggunakan indikator pertama dengan disandingkan dengan indikator yang kedua. Yang mana isi dari indikator yang pertama terkait dengan faktor yang menyebabkan itsbat nikah di Kabupaten Pacitan. Penyebabnya adalah karena adanya pernikahan siri yang dilakukan oleh mereka yang melakukan itsbat nikah sementara indikator yang kedua yaitu terkait tujuan diberlakukannya UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.

⁴¹ Marbuddin, 1977/1978, Pengertian, Azaz dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, hlm. 8.

Disini terdapat kesenjangan peraturan yang mana sesuai dengan tujuan diberlakukannya hukum yaitu untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat.⁴² Yang mana tujuan diberlakukannya pencatatan pernikahan untuk mengatasi kasus pernikahan siri yang dapat menyebabkan permasalahan atau ketidakbertanggungjawaban seorang laki-laki atau suami kepada istrinya disebabkan pernikahan yang dilakukannya tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga pihak pemerintah selaku negara mewajibkan pencatatan pernikahan untuk mengatasi hal tersebut. Akantetapi adanya ketentuan itsbat nikah dapat memberikan celah bagi orang khususnya kaum laki-laki untuk menikah secara siri. Ketika melihat data dari Pengadilan Agama Pacitan kasus terbanyak dari pengajuan Itsbat nikah disebabkan karena pernikahan siri. Padahal telah dijelaskan hukum tanpa adanya sangsi maka tidak dapat berjalan sebagaimana tujuannya.

Menurut teori efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu

⁴² Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12

benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Sehingga hal ini dengan adanya isbat nikah maka memberikan celah bagi pelaku hukum untuk melanggar hukum UU No. 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Pernikahan. Pelanggaran hukum tersebut disebabkan dari peraturan yang memperbolehkan isbat nikah bagi pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pada dasarnya peraturan Itsbat nikah sebagai alternative bagi pernikahan yang belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Akan tetapi dapat berlaku sebaliknya yaitu digunakan sebagai celah hukum oleh oknum-oknum tertentu.

Menurut Soerdjono terdapat beberapa faktor yang menyebabkan efektifitas hukum yaitu 1). Faktor Hukumnya Sendiri, 2). Faktor Penegak Hukum, 3). sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4). Faktor Masyarakat dan 5). Faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut apabila dianalisis dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Faktor yang menyebabkan penerapan UU No. 22 tentang pencatatan Perkawinan tidak berjalan mulus dalam arti masyarakat masih banyak yang ditemukan melakukan pernikahan siri hal ini disebabkan dikarenakan diperbolehkannya itsbat nikah bagi pernikahan yang belum

tercatat di KUA. Bahkan sesuai dengan kaidah hukum yang sifatnya memaksa dengan adanya sanksi pada konteks ini bukan sanksi yang diberikan akan tetapi alternative bagi yang melangarnya. Maka tidak heran kalau ditemukan beberapa kasus wanita di tinggal kabur oleh suaminya lantaran dari pernikahan siri. Seperti yang dialami oleh warga kecamatan arjosari yaitu rara yang melakukan pernikahan siri dengan suaminya di Jakarta kemudian setelah pulang kepacitan rencana akan menikah secara sah dengan mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Pacitan akan tetapi tidak diketahui bahwa sang suami menghilang begitu saja tanpa ada Kabupatenar hingga sekarang. Akan tetapi mereka dalam masyarakat sudah berstatus janda dan mengurus keluarganya sendirian.⁴³

Meski dalam realita pengajuan Itsbat nikah yang menentukan dikabulkannya permohonan tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama dengan pertimbangan yang cukup banyak yaitu dengan mempertimbangkan UU dan peraturan Agama serta pertimbangan ada tidaknya konflik dari perkawinan tersebut akan tetapi hal ini tidak memberikan

⁴³ Wawancara rara, di Rumahnya arjosari pacitan

pengaruh pada persepsi masyarakat. Masyarakat yang mengetahui begitu rumitnya sidang permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama hanya dari beberapa kalangan masyarakat saja, hanya masyarakat yang telah menyaksikan persidangan tersebut. Akantetapi terkait peraturan Itsbat Nikah ini yang mengetahui tentang diperbolehkannya Itsbat Nikah bagi orang yang menikah yang tidak tercatat Di Kantor Urusan Agama sangatlah banyak. Kekawatiran dari persoalan ini apabila terdapat niat buruk para oknum untuk menikahi wanita dengan secara siri setelah menikmati pernikahannya mereka langsung kabur begitu saja.

Dapat ditarik kesimpulan peraturan itsbat nikah dapat mengganggu penerapan kewajiban pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Dengan berdasarkan pada indikator yang pertama bahwa kebanyakan kasus itsbat nikah dilakukan oleh pasangan suami istri dari pernikahan siri. Bukan dari pernikahan yang tidak dicatat karena sebelum peraturan ini diberlakukan. Dalam arti tujuan dari kewajiban pencatatan perkawinan untuk menghindari pernikahan siri yang dapat menimbulkan konflik tidak bertanggungjawabnya seorang

suami maka hal ini itsbat nikah dapat menjadikan celah bagi orang untuk melakukan pernikahan siri.

Akantetapi permasalahan yang terjadi ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah ketika terjadi korban perempuan dari penghianatan suami pada pasangan pernikahan siri dikategorikan sebagai korban kekerasan dan pelecehan pada perempuan. Hal ini tidak diketahui bahwa terdapat beberapa penyebab dari pernikahan siri yang gagal tidak sampai itsbat nikah sudah cerai.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat penulis Tarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang menyebabkan itsbat nikah di Kabupaten Pacitan yaitu adanya pernikahan siri yang dilakukan di luar Kabupaten Pacitan atau di Kabupaten Pacitan.
2. Prosedur pelaksanaan itsbat nikah sebagaimana tercantum pada Buku pedoman panduan administrasi Pengadilan Agama Pacitan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. implikasi itsbat nikah terhadap kewajiban pencatatan pernikahan sesuai UU No. 22 tahun 1946 maka ketika melihat faktor terjadinya itsbat nikah disebabkan dari adanya pernikahan siri sementara tujuan penerapan UU No. 22 tahun1946 untuk mengatasi adanya konflik yang disebabkan dari pernikahan siri hal ini tidak dapat berpengaruh pada penerapan UU tersebut. Sesuai dengan

teori dalam penegakan hukum bahwa hukum tanpa adanya sangsi maka tidak dapat berjalan dengan maksimal.

B. Saran-saran

Saran peneliti kepada pemerintah untuk meneliti ulang terkait pengaruh diperbolehkannya itsbat nikah terhadap UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan. Sehingga dapat berjalan sesuai tujuan dari diberlakukannya hukum tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Cucu sholihah, Kebijakan *Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan Siri Dan Campuran Di Kabupaten Cianjur, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.4, Oktober 2019,

Djam'nan Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010).

Durkheim, Emile, *The Rules of Sociological Method*, (London: Macmillan, 1982),

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodeologi Penelitian Sosial* Ed. II (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

Iskandar & sudirman, *Transformasi Pencatatan Perkawinan Terhadap Itsbat Nikah Di Indonesia Dalam Tinjauan Masalah*, TRANSFORMASI: Jurnal Kepemimpinan

Dan Pendidikan Islam Volume: 3 Nomor 1 Desember
2019

J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 1994).

Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis
Peradilan Agama, Buku II*, (Jakarta, 2010).

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut
Mazhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hanbali* (Jakarta:
Hidakarya Agung, 1996).

Mariyatul Qibtiyah, *Itsbat Nikah Massal Dan Implikasinya
Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi Di Kua
Surabaya Prespektif Maqasid Shari'Ah*, Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas
Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Peradatan Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya 2020

- Matthew B. Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Tjetjep Rohendi Rohidi (terj.), Jakarta: UI Press, 1992,
- S. Nasution, *Metode Penelitian (Penelitian Ilmiah) Usul Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket* (Cet. X; Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2004)
- Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian, 2008).
- T. Fatimah Djajasudarma, *MetodeLinguistik (Ancangan Metode Penelitian dan Kajian)*,(Bandung: Refika Aditama, 2006).

Wahbah Zuhaili, *All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu* (Beirut, Dar-al-Fikr, 1989).

Yusriyah, *Melegalkan Perkawinan Siri dan Perkawinan Campuran Melalui Itsbat Nikah (Studi di Kabupaten Banyumas)*, *alhamra jurnal studi islam*, Volume 1, No. 1, Februari, 2020.

